

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sebuah sistem pemerintahan tidak terlepas dari kebijakan birokrasi instansi pemerintahan tersebut, karena untuk mencapai sebuah pemerintahan yang dibutuhkan mampu bersifat *good governance* dalam hal ini diharapkan roda pemerintahan yang profesional. Di suatu instansi juga forum pemerintahan, tidak bisa dihindari bahwa teknologi informasi menjadi invalid hal itu menjadi satu asal daya yang paling primer dimana untuk meningkatkan persaingan serta pelayanan pegawai yang maksimal (Nugroho, 2013).

Di era globalisasi perkembangan teknologi informasi sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dimana seluruh aspek kehidupan hampir terkena dampak/pengaruhnya. Pengelolaan informasi yang dahulu dilakukan menggunakan sistem manual, dimana kini telah berubah dengan menggunakan sebuah *software* yang didesain spesifik buat mempermudah pekerjaan. Untuk menerima sebuah informasi teknologi berbasis *web* sangat berkembang dan seseorang hanya cukup mengakses melalui *web* yang bisa didukung darimana serta kapan saja (Novianto, 2016).

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good government*) di era otonomi ini, setiap daerah diharuskan menggunakan istilah *electronic government (e-government)*. Dimana teknologi dan informasi kini menjadi salah satu dasar utama pengembangan sebuah tempat disamping

ketersediaan sumber daya manusia yang harus handal. Instansi maupun lembaga pemerintahan yang menyediakan sistem teknologi informasi yang memadai dapat menyampaikan pelayanan yang lebih akurat dan sebaliknya ketika ketersediaan teknologi yang terbatas pada satu lembaga akan membentuk sistem pelayanan akan memperlambat bahkan sangat sulit buat memberikan pelayanan yang memuaskan (Haris dkk, 2020).

Penerapan teknologi informasi disetiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dilakukan untuk menuju *good governance*. Dimana teknologi dan isu sekarang ini menjadi salah satu dasar utama pengembangan sebuah forum disamping ketersediaan asal daya manusia yang memang wajib handal. Salah satu alat upaya untuk menyebarkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronika serta dapat mempermudah pegawai dengan pemanfaatan dan perkembangan teknologi diiringi melebarnya penggunaan internet sebagai akses ke media sosial, maka dari itu perkembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi ini sebagai daya saing pada zaman modern ini merupakan penerapan kebijakan *e-government* (Sadat, 2019).

Dalam memakai dan menggunakan sistem manajemen ini memungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan dan fungsi pelayanan yang baik termasuk kedalam otomatisasi penggunaan sistem kepegawaian. Tujuan dibangunnya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 ini buat mendukung pemantapan administrasi kepegawaian yaitu pengelolaan data pengumpulan data kepegawaian yang bersifat baku dan seragam. Didalam SIMPEG ini membuat database pegawai mirip data utama Pegawai Negeri Sipil (PNS), biodata Pegawai

Negeri Sipil (PNS), data gaji, jabatan, pangkat, unit kerja serta hubungan keluarga. Selesaiannya dilaksanakan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 sampai ketika melalui aktivitas pemutakhiran database pegawai, perubahan jenis data, elemen data, perubahan kodefikasi pada tabel-tabel dan struktur *database* pegawai (Dharmawan, 2019).

Sistem yang terpadu terdiri atas perangkat pengelolaan yang meliputi pengumpulan, mekanisme, energi pengelolaan serta aplikasi. Atau bisa diartikan juga sebagai sistem yang sangat penting serta dibutuhkan pada setiap instansi juga forum pemerintahan dalam menyampaikan pelayanan pada masyarakat, sebab pada hal ini pegawai adalah aset terpenting pada penyelenggaraan organisasi maka perlu dikelola dengan baik dan itu merupakan makna dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 (Nugroho, 2013).

Dilihat masih kurangnya dalam pengelolaan data kepegawaian maka peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian mampu dinilai melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 karena dalam hal ini artinya salah satu upaya pada pengembangan *e-government* perlunya penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 ini untuk menetapkan administrasi kepegawaian sebagai upaya memenuhi berita data pegawai menggunakan cepat, tepat, akuntabel (Sadat, 2019).

Pemerintah dalam hal ini berupaya membuat pemanfaatan kemajuan teknologi salah satunya memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat sebagai akibatnya kepuasan warga ini bisa tercapai. Keberhasilan pada memilih

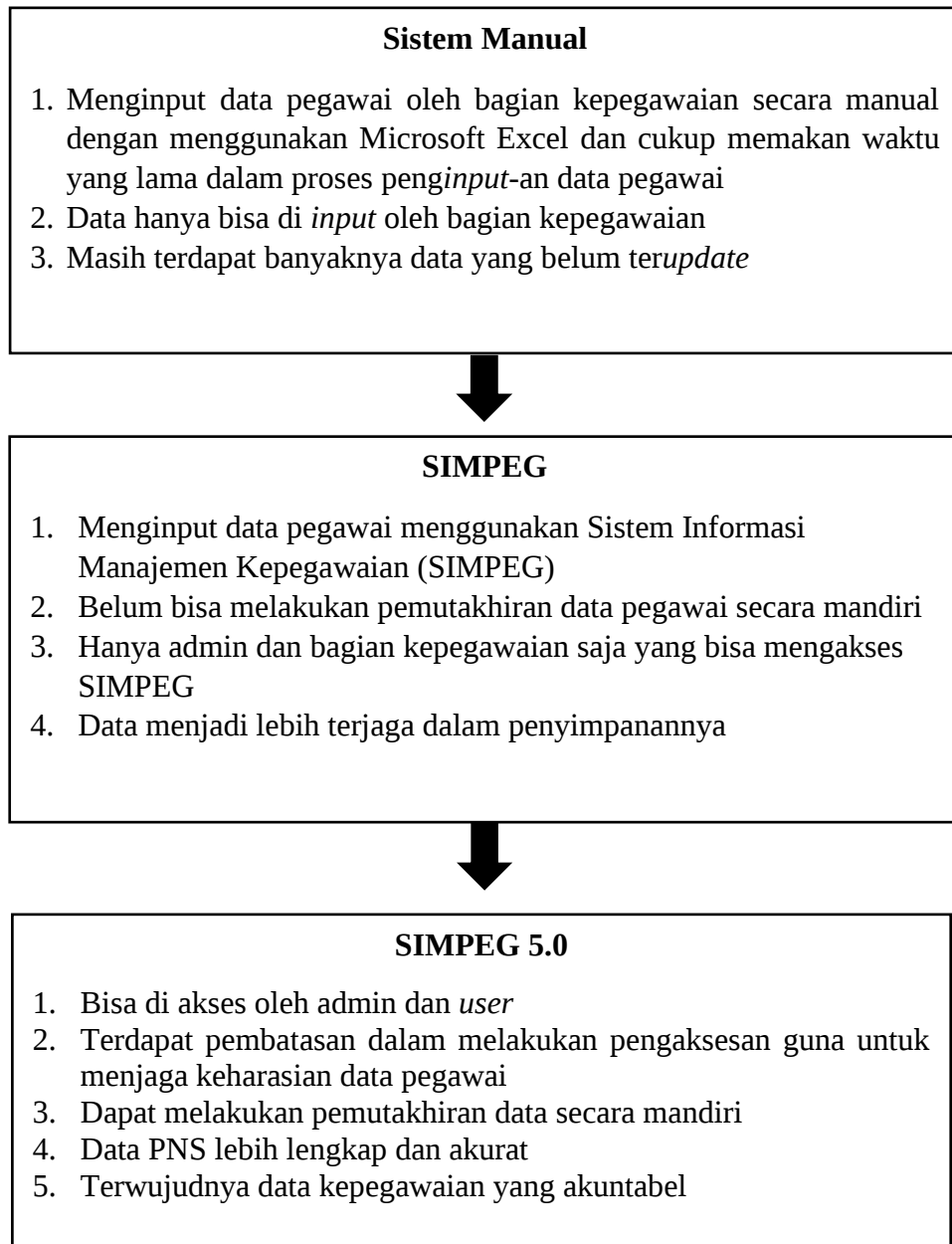
perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satunya dipengaruhi oleh adanya dukungan informasi yang cepat serta akurat bisa membantu dalam pengembangan organisasi sebagai akibatnya informasi ini berperan sangat penting dalam suatu organisasi (Pratiwi, 2018).

Sebelum adanya SIMPEG ini dalam melakukan pengarsipan data pegawai melalui sistem manual yaitu menggunakan microsoft excel yang dimana setiap data pegawai itu diurutkan mulai dari jabatan, golongan sampai tanggal masa pensiun. Akan tetapi dengan sistem manual ini tidak bisa dijamin dalam pengarsipannya karena jika *human eror* tidak ada *back up* data sehingga tidak di jamin dalam penyimpanannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan menerapkan SIMPEG ini mendukung bidang kepegawaian dalam pengelolaan data. Tujuan SIMPEG dalam Kepmendagri merupakan terciptanya *database* kepegawaian mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Departemen Dalam Negeri yang dapat menampung, mengelola, menyimpan, menentukan kembali dan mendistribusikan data pegawai. Sistem Informasi manajemen Kepegawaian (SIMPEG) ini diharapkan dapat mengatasi persoalan mengenai pendataan pegawai yang diterjadi sepanjang waktu sehingga tidak ada lagi pegawai yang merasa dirugikan serta dapat meningkatkan proses pengembangan pegawai (Kepmendagri, 2020).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 344 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Kementerian Agama. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) ini sebelumnya hanya bisa diakses oleh operator atau

pengelola SIMPEG saja, terdapat suatu waktu dimana dalam proses *pengupdatean* data pegawai cukup memakan waktu yang lama karena harus di *input* satu persatu dan masih terdapat data kepegawaian yang belum dilakukan pemutakhiran setelah itu diadakan inovasi baru dengan di keluarkannya Surat Edaran Nomor: 15 /SJB.II.1/05/2021 tentang pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara mandiri pada SIMPEG 5.0 Kementerian. Dengan adanya SIMPEG 5.0 ini sudah bisa melakukan pemutakhiran data secara mandiri dan sudah bisa di akses oleh *user* dan admin sehingga dalam melakukan pemutakhiran data secara mandiri ini terciptanya laporan data kepegawaian yang akuntabel. Salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 adalah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur pada hal ini didasari akan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi yang semakin semakin pesat hingga saat ini terutama teknologi informasi yang diharapkan dalam perencanaan, pengembangan, pengendalian, pengelolaan dan memperoleh data pegawai menggunakan cepat dan seksama dapat tercapai dengan baik dalam kebutuhan organisasi.

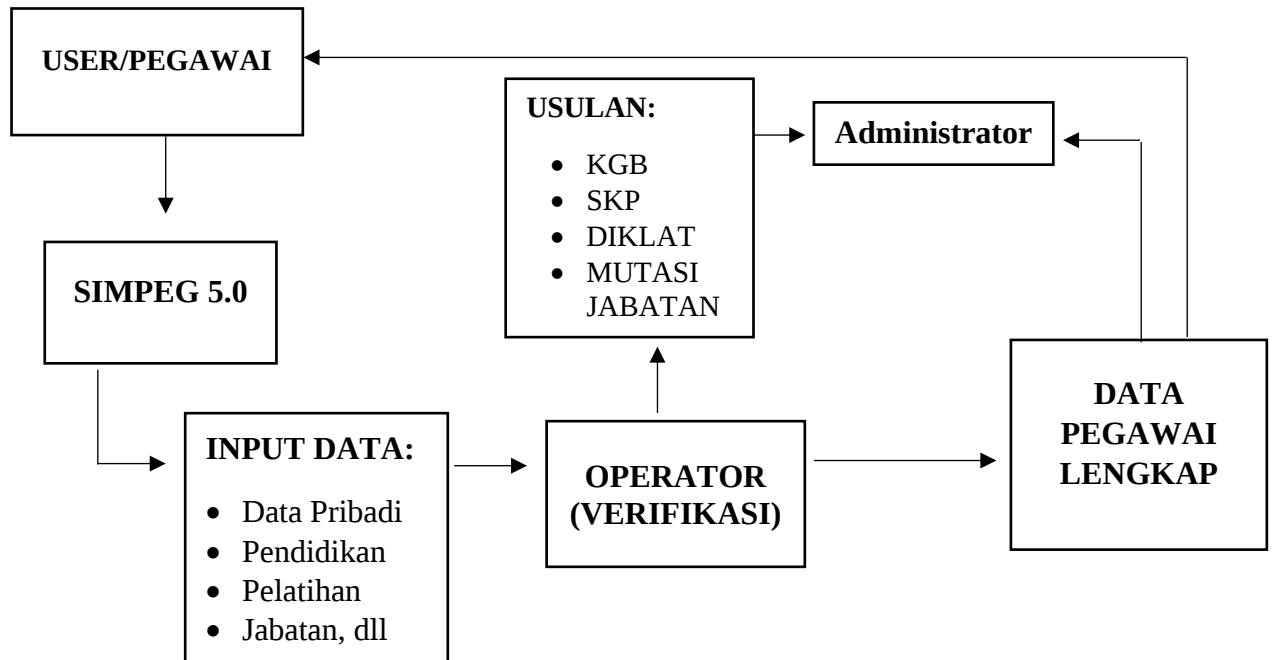
**Gambar 1.1 Perkembangan Layanan Penginput-an Data Pegawai Di
Kementerian Agama Kota Jakarta Timur**



Sumber: Kementerian Agama Kota Jakarta Timur

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 344 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Kementerian Agama. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) ini sebelumnya hanya bisa diakses oleh operator atau pengelola SIMPEG saja, terdapat suatu waktu dimana dalam proses *pengupdatean* data pegawai cukup memakan waktu yang lama karena harus di *input* satu persatu dan masih terdapat data kepegawaian yang belum dilakukan pemutakhiran setelah itu diadakan inovasi baru dengan di keluarkannya Surat Edaran Nomor: 15 /SJB.II.1/05/2021 tentang pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara mandiri pada SIMPEG 5.0 Kementerian. Dengan adanya SIMPEG 5.0 ini sudah bisa melakukan pemutakhiran data secara mandiri dan sudah bisa di akses oleh *user* dan admin sehingga dalam melakukan pemutakhiran data secara mandiri ini terciptanya laporan data kepegawaian yang akuntabel. Salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 adalah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur pada hal ini didasari akan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi yang semakin pesat hingga saat ini terutama teknologi informasi yang diharapkan dalam perencanaan, pengembangan, pengendalian, pengelolaan dan memperoleh data pegawai menggunakan cepat dan seksama dapat tercapai dengan baik dalam kebutuhan organisasi.

Gambar 1.2 Alur SIMPEG 5.0



Sumber: Kementerian Agama Kota Jakarta Timur

Adapun alasan yang melatarbelakangi pengimplementasian SIMPEG pada Kementerian Agama Kota Jakarta Timur masih terdapat kesulitan dalam mengelola informasi pegawai karena banyaknya informasi yang harus dikelola, masih terdapat data kepegawaian yang belum dilakukan pemutakhiran mempengaruhi dalam pengimplementasian SIMPEG di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur salah satunya dalam penginputan data pegawai terdapat beberapa pegawai yang telat dalam penginputan data dan kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan *web* tersebut sehingga memakan waktu yang cukup lama dan menjadi tidak efisien. Jika dilihat dengan SIMPEG versi 4.0 dan 5.0 ini memiliki perbedaan dimana versi 5.0 ini pegawai sudah bisa melakukan pemutakhiran data secara mandiri tetapi hal ini masih terdapat keterlambatan dalam penginputan data pegawai apakah karena

kurangnya pemahaman dari pegawai atau karena dari faktor lain. Oleh karena itu, penulis bertujuan mengambil penelitian dengan judul "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur".

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan yang ada dilatar belakang maka perumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur?
2. Bagaimana Dampak penggunaan dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur?
3. Apa saja Kendala dalam pengimplementasian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur
2. Menganalisis Dampak pengimplementasian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur

3. Menganalisis Kendala penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan penelitian terkait Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 sudah banyak dilakukan di beberapa instansi. Penelitian ini berfokus pada kesiapan pemerintah dalam menciptakan sistem, model birokrasi yang profesional, akuntabel dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaannya. Sehingga membutuhkan beberapa referensi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 baik berupa jurnal, skripsi dan buku. Berbagai kajian pustaka sebelumnya dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu meresmikan beberapa jurnal. Namun penelitian ini belum menemukan penelitian terkait tentang Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, hanya ada beberapa jurnal yang menjelaskan sistem informasi sebagaimana berikut:

Rujukan pertama pada penelitian ini dengan judul Implementasi sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Kementerian Agama

Kabupaten Sinjai yang ditulis oleh Abd. Haris, Sumardi dan Fitrianti Hamka pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Jurnal Al Qisthi Vol 10 (2). Penelitian ini melatarbelakangi di era otonomi ini setiap daerah dituntut dan wajib untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi serta Komunikasi (TIK) atau lebih populer dikenal dengan istilah *electronic government (E-government)*. Salah satu program yang dapat diaplikasikan pada mewujudkan (*good governance*) ialah sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG). Penelitian ini bertujuan penelitian ini adalah bagaimana mendeskripsikan Adopsi dan penerapan *Information Communication and Technology (ICT)* dalam ranah pemerintahan, selain sebagai bentuk inovasi, juga merupakan bukti transformasi dan tolak ukur peningkatan kinerja birokrasi terutama dalam memberikan akses pelayanan prima. Pedoman yang dipakai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2016. Metodologi penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini memberikan bahwa implementasi SIMPEG ini belum optimal hal ini ditimbulkan sebab kapasitas sumber daya manusia masih tergolong rendah sebagai akibatnya terjadi kecenderungan gagal teknologi dalam pengoperasian SIMPEG, pada aspek kebijakan tergolong lemah hal itu dibuktikan menggunakan belum adanya *Standard Operational Procedure (SOP)* yang dibuat sebagai akibatnya cenderung tumpang tindih dalam proses pelayanannya, lalu belum adanya penilaian terhadap upaya peningkatan kapasitas jaringan serta

anggaran operasional ialah bukti nyata belum optimalnya implementasi SIMPEG. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan teori atau model yang lain untuk mengoptimalkan implementasi SIMPEG. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kesamaan lainnya terdapat pada teori penelitian yang berdasarkan pedoman Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 344 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Kementerian Agama.

Rujukan kedua pada penelitian ini dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai Dasar Pangambilan Keputusan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di BKDIKLATDA Kota Salatiga yang ditulis oleh Athin Pratiwi tahun 2018 diterbitkan oleh Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN) Vol. 02(2). Penelitian ini melatarbelakangi pemerintah berupaya memanfaatkan kemajuan teknologi menggunakan menyampaikan pelayanan dengan harapan kepuasan masyarakat bisa tercapai. Dalam menghadapi permasalahan ketidakakuratan informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satu yang bisa dilakukan dengan membentuk sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dengan tujuan memberikan informasi serta menyediakan data yang lengkap serta tersusun secara sistematis sebab akibatnya bisa digunakan menjadi bahan analisis dan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan pada bidang kepegawaian.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) menjadi dasar pengambilan

keputusan yang ada dan faktor penghambat dalam pengimplementasian SIMPEG. Pedoman yang dipakai berdasarkan Keputusan Mendagri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda dijelaskan bahwa elemen yang ada di dalam SIMPEG. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dituangkan dalam bentuk hasil analisis yang tersaji pada bentuk uraian deskriptif. Hasil penelitian ini sudah berjalan dengan baik meskipun dalam melakukannya belum terdapat standar kualifikasi bagi pegawai yang menangani SIMPEG. Menggunakan SIMPEG pemerintah dapat membantu memberikan data kepegawaian yang efisien, akurat serta cepat. Rekomendasi berdasarkan belum adanya standar acuan pengelolaan SIMPEG maka peneliti menyarankan adanya standar atau patokan buat pengelolaan SIMPEG sehingga data yang di input valid dan sempurna ketika pada hal pelaporan data. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat kesamaan metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kesamaan lainnya terdapat pada teori penelitian yang berdasarkan pedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Rujukan ketiga pada penelitian ini dengan judul Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis *web* di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung yang ditulis oleh I Wayan Dharmawan, A.A. Gede Raka dan I Made Mardika pada tahun 2019 diterbitkan *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* No. 4(1) 31-38. Penelitian ini melatarbelakangi Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan daerah desentralisasi. Dengan menggunakan asas desentralisasi ini maka daerah tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pada instansi pemerintah.

Teori yang dipakai Implementasi Kebijakan Publik menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2012:177) dan SIMPEG berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dan analisis data menggunakan kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian bahwa implementasi program SIMPEG berbasis *web* sudah berjalan cukup baik sinkron dengan empat unsur yang memilih implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pada implementasi acara SIMPEG menyangkut isi kebijakan, dukungan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan komunikasi. Penelitian selanjutnya juga bisa memakai model lain atau teori lain sehingga bisa diperoleh bahan implementasi program SIMPEG sebagai pengembangan SIMPEG lebih optimal. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan terdapat kesamaan pada teori yaitu teori

implementasi kebijakan menurut Edward (2002) yang di dalamnya terdapat empat aspek yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dimana empat aspek tersebut saling mempengaruhi satu sama lain untuk tujuan yang sama serta kesamaan lainnya berdasarkan pedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000.

Rujukan keempat pada penelitian ini dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara yang ditulis oleh Anuar Sadat tahun 2019 dipublikasi oleh Jurnal Buletin Utama Teknik Vol. 14 (3). Penelitian ini melatarbelakangi perlunya penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) artinya buat memantapkan administrasi kepegawaian menjadi upaya memenuhi kebutuhan info data pegawai yang cepat, sempurna, akuntabel serta *purposive sampling*. Menggunakan mengkonversi data manual menjadi data digital ke dalam suatu *database* dan *software* terkomputerisasi pada satu sistem yang dianggap sistem berbasis *website* yang ditunjukan buat penggunaan secara fleksibel. Penelitian bertujuan mengetahui implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG).

Teori yang digunakan menurut Webster's Dictionary (1979:914) kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari kata "*plere* dan Aturan yang mendasari implementasi SIMPEG ini adalah permendagri Nomor: 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 125 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementrian dalam Negeri. Metodologi

penelitian ini memakai pendekatan penelitian deskriptif kualitatif teknik analisis pada penelitian ini adalah individu menggunakan memanfaatkan informan kunci. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara. Hasil penelitian ini diukur dengan menggunakan dua dimensi yakni sumber daya manusia dan aplikasi mekanisme. Implementasi SIMPEG ini sudah berjalan dengan baik tetapi masih perlu ditingkatkan dalam pengadaan sarana dan prasarana terkait dengan *IT*. Penelitian selanjutnya dapat pula dengan memakai contoh lain sehingga bisa diperoleh bahan penilaian penerapan SIMPEG sebagai akibatnya pengembangan SIMPEG lebih optimal. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat kesamaan pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan juga penentuan informan yang menggunakan informan kunci (*key informan*) kesamaan lainnya terdapat pada pedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Rujukan kelima pada penelitian dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis *Web* menggunakan *Framework Codeigniter* dan *Bootstrap* yang ditulis oleh Dian Novianto di tahun 2016 yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Informatika Global Vol.7(1). Penelitian ini melatarbelakangi teknologi informasi pada era globalisasi waktu ini sudah masuk hampir pada seluruh aspek kehidupan, pengelolaan informasi yang dahulu dilakukan menggunakan sistem pembukuan, kini telah berubah dengan kemajuan teknologi ini menjadi bantuan sebuah *software* yang dirancang spesifik untuk mempermudah pekerjaan. Terlebih saat ini teknologi internet sudah sangat berkembang sehingga buat menerima sebuah informasi seorang cukup mengakses

lewat perangkat yang didukung berasal dari mana saja dan kapan saja. Penelitian ini bertujuan untuk membuat perangkat lunak atau aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) berbasis *web* menggunakan *framework codeigniter* serta *bootstrap* di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang sebagai pengganti perangkat lunak yang lama. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana sumber data hasil dari wawancara mendalam dan observasi.

Hasil penelitian ini mempermudah proses pengumpulan data pegawai yang dilakukan melalui *web*, dimana dalam hal ini pegawai bisa menginput data secara mandiri atau memperbaharui data yang telah terdapat jika ada perubahan dan perubahan ini bisa dilakukan dimanapun serta kapanpun. Dengan demikian pegawai tidak harus lagi menyebarkan formulir pada para pegawai dalam hal ini merupakan dosen baik dosen struktural maupun fungsional tidak hanya itu proses pendataan pegawai mampu lebih efektif dan efisien serta laporan dari perangkat lunak ini mampu dicetak kedalam bentuk spreadsheet. Rekomendasi akademik perangkat lunak ini dirancang hanya buat pegawai yang statusnya artinya dosen, seangkan buat staff atau karyawan yang bukan dosen belum tersedia sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa dilakukan penambahan kajian atau buat *entry* data karyawan. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat kesamaan pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dimana sumber data hasil dari wawancara mendalam dan observasi.

Rujukan keenam pada penelitian ini dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Menggunakan *Framework* Cobit 4.1 (Studi

Kasus: Kementerian Agama Kantor Kota Pekanbaru) yang ditulis oleh Arrofik Zulkarnaen, Anggraini pada tahun 2016 yang dipublikasi oleh Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi Vol.2 (2). Penelitian ini melatarbelakangi tahun 2011 Biro kepegawaian melakukan peningkatan teknologi terhadap SIMPEG versi 3.0 menjadi SIMPEG 4.0. mengingat pentingnya pengelolaan data pegawai maka peningkatan kualitas pelayanan melalui SIMPEG pada tahap pengembangan *e-government*. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kondisi pengelolaan *IT*, menilai kinerja, menilai tingkat pencerahan pengelolaan dan membentuk suatu rekomendasi terhadap penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) Teori yang digunakan pedoman asal COBIT 4.1. *Control Objectives for Information and Related Tehcnology*. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Hasil penelitian memakai 10 sampel memberikan bahwa tingkat *maturity level* pada *Control Objectives Deliver and Support* (DS1) berada pada tingkat 3 (*defined*). Untuk *management awareness* 33,33% menganggap sangat perlu dan 66,66% perlu dilakukannya pengelolaan tingkat layanan pada SIMPEG. Rekomendasi penelitian berikutnya diharapkan memakai seluruh *Control Objectives for Information and Related Tehcnology* (COBIT). Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada topik penelitian dimana topik dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam penelitian penulis tentang menilai kinerja, meningkatkan pengelolaan sistem dengan baik.

Rujukan ketujuh pada penelitian ini dengan judul evaluasi penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah

Kepegawaian daerah Kabupaten Pamekasan dengan pendekatan *Human-Organization-Technology* (HOT) Fit yang ditulis Rohmat Indra Borman, Abidarin Rosidi dan M. Rudyanto Arief tahun 2012 diterbitkan oleh Jurnal Teknologi Informasi. Penelitian ini melatarbelakangi wacana pembentukan tatnan pemerintah yang tertib dan teratur harus dibuat forum lembaga daerah untuk mengatur jalannya pemerintahan dengan ruang lingkup pekerjaan dan wewenangnya. Penelitian ini bertujuan buat sejauh mana keberhasilan penerapan sistem sistem informasi manajemen (SIMPEG) ditinjau dari pendekatan *Human Organization Tecnology* (HOT) Fit. Teori yang digunakan teori HOT Fit dikemukakan oleh Yusuf et al (2006) di koferensi Internasional Hawaii Science System ke-39. Teori ini dibuat asal dua model penilaian untuk sistem informasi, model tadi ialah D&M IS *Succes* (DeLone serta Mclean, 2004) dan *IT Organization Fit* (Morton, 1991). Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan jenis data penelitian primer dan sekunder. Teknik perolehan data menggunakan informasi lapangan atau kuesioner sebagai pengumpulan data.

Hasil penelitian ini penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) ini memiliki tingkat keberhasilan yang cukup baik, karena berdasarkan hasil pembagian terstruktur mengenai tingkatan skor data informasi lapangan mengatakan sudah baik, faktor-faktor keberhasilan yang terdapat pada model HOT-Fit serta hubungan antara komponen organisasi dan teknologi sudah baik meskipun ada beberapa faktor yang perlu ditingkatkan dalam mewujudkan keberhasilan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) ini. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat kesamaan rumusan

masalah penelitian dimana rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui atau mengukur sejauhmana keberhasilan penerapan sistem informasi manajemen tersebut.

Rujukan kedelapan pada penelitian ini berjudul Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Pemerintahan Kota Bogor ditulis oleh Raden Kodarisman, Eko Nugroho tahun 2013 yang diterbitkan jurnal JNTETI, Vol.2(2). Pada penelitian ini melatarbelakangi mengungkapkan tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi informasi menjadi alat salah satu sumber daya primer disebuah organisasi untuk menaikkan daya saing dan pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, setiap organisasi menerapkan teknologi informasi agar bisa menaikkan efektifitas serta efisiensi dalam proses usaha, inisiatif *e-government* pada Indonesia sudah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada Pemerintah Kota Bogor menggunakan model HOT-Fit melihat tiga faktor yaitu faktor manusia, faktor teknologi serta faktor organisasi. Teori yang digunakan ialah HOT-Fit dikemukakan oleh Yusof et al (2006) di Konferensi Internasional Hawaii Science System ke-39 dengan contoh *Human Organization-Tecnology* (HOT)-Fit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan survei dan mengumpulkan data primer melalui wawancara. Teknik pengambilan sampel memakai random sampling yang diukur menggunakan Skala Likert dengan analisis data memakai partial last squar dengan aplikasi SMARTPLS.

Hasil penelitian ini kualitas sistem serta kualitas layanan memiliki dampak terhadap penggunaan sistem dan kepuasan pengguna sedangkan kepuasan pengguna dan struktur organisasi berpengaruh terhadap *net benefit* (tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$). Kesuksesan penerapan SIMPEG ini dipengaruhi oleh faktor kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan sistem serta peran struktur organisasi. Rekomendasi akademik untuk penelitian selanjutnya perlu melibatkan variabel-variabel tambahan yang belum atau perlu diperhitungkan misalnya partisipasi dan keterlibatan dalam proses desain atau kebutuhan sistem informasi. Penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan model lain sehingga dapat memperoleh bahan evaluasi penerapan SIMPEG sehingga bisa menjadi lebih optimal. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada rumusan masalah penelitian mengevaluasi tingkat keberhasilan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Rujukan kesembilan pada penelitian ini dengan judul Analisis Efektivitas SIMPEG dalam Mewujudkan *E-Government* pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang ditulis oleh Benyamin Kali Patembal Harahap, Sjahril Effendy & Muis Fauzi Rambe pada tahun 2021 yang dipublikasi *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 4 (1). Penelitian ini melatarbelakangi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pembinaan ternyata tidak efektif pada membentuk karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis teknologi. Pengembangan sumber daya manusia yang berbasis teknologi menciptakan SIMPEG. Penelitian ini bertujuan mewujudkan *e-government* tepatnya pada tempat kerja Imigrasi kelas II TPI Belawan. Teori yang dipakai

menggunakan pedoman Pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sumber penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan memakai analisis logika berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa SIMPEG dalam pelaksanaannya belum efektif pada meningkatkan profesional pegawai, belum digunakan dalam rangka penempatan pegawai dengan kompetensinya serta blm digunakan dalam rangka pengambilan keputusan mutasi pegawai dan kenaikan pangkat jabatan. Rekomendasi penelitian selanjutnya bisa juga dengan memakai model lain sebagai akibatnya dapat diperoleh bahan penilaian efektifitas SIMPEG sebagai akibatnya pengembangan SIMPEG lebih optimal. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat kesamaan pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka.

Rujukan kesepuluh pada penelitian ini dengan judul Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis *Online* Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru yang ditulis oleh Wasiah Sufi dan Dwi Herlinda tahun 2017 dan dipublikasi Jurnal Niara Vol 9(2). Penelitian ini melatarbelakangi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin tinggi menyebabkan semakin canggihnya teknologi yang dipergunakan oleh manusia sebagai akibatnya hal ini menjadi titik awalnya teknologi sebagai semakin canggih serta mutakhir, mirip adanya internet. Penggunaan teknologi personal komputer yang dewasa ini semakin meluas tentunya membantu para pelaku pelayanan publik dalam mengambil keputusan didalam operasional pemerintahan baik itu kegiatan

administrasi, pelayanan juga dalam pengelolaan data kepegawaian. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem aplikasi berbasis *e-government* dan faktor penghambat aplikasi *e-government* dengan menggunakan layanan pekerjaan *Application System (SAPK Online)*.

Pelaksanaannya berpedoman Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Perpindahan Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian *Online (SAPK Online)*. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian *Online (SAPK Online)* telah teralisasi namun pada dasarnya penggunaan belum bisa menggunakan serta memanfaatkan Sistem (*SAPK Online*) secara maksimal. Penelitian ini berkontribusi pada bagian metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dengan versi 3.0 sampai 4.0 nya saja disuatu badan publik (Haris, 2020; Dharmawan, 2019; Sadat, 2019; Novianto, 2016; Sufi, 2017). Namun, ada juga penelitian terdahulu yang membahas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) (Pratiwi, 2018). Ada juga penelitian terdahulu yang membahas Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Zulkarnaen, 2016; Indra,

2012; Kodarisman, 2013). Dan ada juga penelitian terdahulu yang membahas Analisis Efektivitas SIMPEG dalam Mewujudkan *e-government* (Harahap, 2021).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebanyakan dari penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian dengan versi 3.0 sampai 4.0 saja dan dikaitkan dengan dasar pengambilan keputusan bidang sumber daya manusia saja, sedangkan penelitian ini membahas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) versi 5.0 pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur dimana dalam versi ini sudah bisa melakukan pemutakhiran data secara mandiri, bagaimana dalam pengimplementasi sistem informasi manajemen kepegawaian ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 344 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yaitu teori Edward III dimana didalamnya terdapat empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya Studi Implementasi Kebijakan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur dan/atau instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan memberikan tambahan data mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 yang efektif dan efisien.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur serta instansi pemerintah dalam melakukan pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) 5.0. Menyebarluaskan terkait informasi dalam pelaksanaan dan pengawasan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) 5.0, dampak yang diberikan serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) 5.0 yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur dan menambah pengalaman pribadi bagi penyusun dalam menulis karya ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian dilakukan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikasi penulisan. Dalam signifikasi penelitian akademik peneliti menguraikan tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini mengenai kerangka teori yang menguraikan pembahasan tentang teori yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5.0 yaitu teori Implementasi, Sistem, Informasi,

Manajemen Kepegawaian. Dalam bab ini juga menguraikan kerangka berfikir dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan pembahasan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data dan teknik analisis data, *Goodness Quality Criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Dengan memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang ingin diteliti.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang telah dilakukan baik secara akademik maupun secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka ini berisi tentang judul-judul jurnal, buku alamat *website* dan produk hukum yang menjadi referensi untuk penulis.